



**Pidato Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa
Pada Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021**

**MEMPERINGATI DAN MENINDAKLANJUTI
KEBANGKITAN NASIONAL**

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Salam dan Bahagia,

Yang saya cintai seluruh Keluarga Besar Tamansiswa,

Pertama-tama saya ucapkan Selamat Hari Kebangkitan Nasional, yang kita rayakan setiap tanggal 20 Mei, yaitu sesuai dengan Hari Kelahiran Boedi Oetomo 20 Mei 1908. Ki Hadjar Dewantara-lah yang mengawali memperingati Hari Kebangkitan Nasional ini.

Perkenankan saya meninjau ke belakang dalam dimensi nasionalisme Indonesia.

Pada tahun 1905 tentara Jepang di Tsushima memporak-porandakan tentara Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia ini melahirkan “kebangkitan Asia”. Bangsa kulit berwarna ternyata bisa mengungguli bangsa kulit putih. Banyak yang meyakini bahwa sejak itu Jepang mulai berambisi menjadi penguasa Asia Timur Raya.

Imbasnya, tiga tahun kemudian, pada 20 Mei 1908, lahirlah gerakan nasional Boedi Oetomo, yang selanjutnya tanggal 20 Mei itu kita sebut sebagai “Hari Kebangkitan Nasional” (*National Awakening Day*).

Pada tahun 1908, enam bulan setelah berdirinya Boedi Oetomo, *Indische Vereniging* didirikan di lingkungan mahasiswa Indonesia di Holland, dan pada tahun 1922 nama *Indische Vereniging* berganti nama menjadi *Indonesische Vereniging*, kemudian menjadi *Perhimpunan Indonesia*. Nama baru ini pada saat yang bersamaan mengetengahkan nama politis yang ditujukan untuk mengharumkan nama Ibu Pertiwi. Majalah *Hindia Putra* pun dirubah namanya menjadi *Indonesia Merdeka*.

Saya lanjutkan: Pada tahun 1927 di Negeri Belanda Mohammad Hatta dan tiga kawannya ditangkap, dipenjarakan dan diadili di Pengadilan Den Haag. Pembelaan (*pleidooi*) Hatta berjudul *Indonesië Vrij* (Indonesia Merdeka). Terkenal dalam pembelaan Hatta di Pengadilan Den Haag itu yang menyatakan: “...lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain. ...”.

Dua tahun kemudian, pada tahun 1930, Soekarno-pun dipenjarakan dan diadili di Bandung, dengan pembelaannya yang berjudul *Indonesië Klacht Aan* (Indonesia Menggugat).

Selanjutnya kita semua mengetahui, pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta dideklarasikan *Sumpah Pemuda*, salah satu tonggak utama dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda ini ditegaskan perkataan “Bangsa Indonesia” (...mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia).

Puncak dari dimensi sejarah nasionalisme Indonesia itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, yang dibacakan oleh Bung Karno di Pegangsaan Timur:

Proklamasi,

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus tahun 1945

Atas nama Bangsa Indonesia

Soekarno – Hatta

Perhatikan, kalimat “*Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l.*” dalam Proklamasi Kemerdekaan itu, telah ditindaklanjuti. Pada tanggal 27 Desember 1949 disetujui Perjanjian KMB antara tiga pihak dalam konferensi itu, yaitu: pihak Republik Indonesia, pihak negara-negara BFO (negara-negara boneka yang didirikan oleh pihak Belanda/van Mook), dan pihak Kerajaan Belanda. Pada dasarnya Perjanjian KMB merupakan *penyerahan kedaulatan* atas Hindia-Belanda oleh Kerajaan Belanda kepada Pemerintah Indonesia.

Kalimat “*Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan d.l.l.*” dalam Proklamasi Kemerdekaan itu, menurut pendapat saya telah pula berlanjut dalam wujud Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957.

Dengan dikeluarkannya Deklarasi Pemerintah RI 13 Desember 1957 itu, yang lebih dikenal sebagai Deklarasi Djuanda, maka Ordonansi Tahun 1930 tidak berlaku lagi di Indonesia, dan garis teritorial laut Indonesia yang sebelumnya hanya 3 mill, menjadi 12 mill. Wilayah kedaulatan Indonesia yang semula 2,027,087 km² (sering dicatat dalam terbitan statistik Indonesia hanya 1,9 km²), menjadi lebih luas 2,5 kali lipat, menjadi 5,193,250 km², belum termasuk Irian Barat.

Deklarasi Pemerintah RI 13 Desember 1957, yang menegaskan tentang *Wawasan Nusantara*, mengandung peranan penting dari Chairul Saleh sebagai pendorong utama lahirnya Prinsip Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) dan Mochtar Kusuma-atmadja sebagai konseptor Prinsip Negara Kepulauan ini. Selanjutnya Deklarasi Pemerintah RI 13 Desember 1957, yang dituangkan dalam UU No. 4/Prp Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia. (Saat itu belum diakui oleh dunia internasional).

Ujung perjuangan yang sangat panjang selama 25 tahun, melalui perjuangan berat dengan kegigihan luar biasa itu, memperoleh pengakuan internasional di PBB, berupa “kemenangan” Indonesia pada UNCLOS III (United Nations Conventions on the Law of the Sea) tahun 1982. Saat kemenangan 1982 itu Ketua Delegasi Indonesia adalah Menteri Kehakiman RI, Prof. Dr. Mochtar Kusuma-atmadja.

Sejak itu, kita mengenal Wawasan Nusantara terpaku dalam GBHN-GBHN kita.

Sampai di sinikah saja kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional? Sudahkah Indonesia bangkit dengan kukuh? Kita mengetahui jawabannya dengan melihat kenyataan yang ada. *Nation and character building* belum tuntas. *Nation building* belum sepenuhnya terbentuk. Artinya persatuan nasional masih sering bergerak divergen, kohesi nasional dan kerukunan nasional belum sepenuhnya bergerak konvergen dan solid. Demikian pula *character building* belum jelas terwujud, kita masih mempertanyakan tentang bentuk keindonesiaan, apalagi di tengah-tengah globalisasi yang semrawut ini, yang mengakibatkan kekacauan terhadap kesadaran peradaban, budaya, identitas bangsa dan etnis.

Kita sebagai orang Tamansiswa mempunyai tanggungjawab untuk mewujudkan

kenasionalan (*nationhood*) Indonesia melalui kurikulum pendidikan dan kebudayaan, sebagaimana digariskan oleh Ki Hadjar Dewantara, yaitu kurikulum yang berlandaskan *kebangsaan* atau *nasionalisme* dalam bhinneka tunggal ika, dengan disertai pengabdian patriotik kepada Ibu Pertiwi, membentuk kebersamaan utuh *Een voor Allen en Allen voor Een*.

Sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan sebagai *asah-asih-asuh* di antara kita, bahwa *nasionalisme* Indonesia memang sedang surut, tetapi nasionalisme Indonesia tidak akan pernah usang, apalagi sirna. Nasionalisme Indonesia akan bangkit dan kokoh kembali. Nasionalisme adalah wujud realistik dan final dari institusi manusia di muka bumi. Lihat *Brexit*, lihat pula sikap President Donald Trump yang supernasionalistik. Untuk itu saya kemukakan wujud nasionalisme tradisional yang kita rawat dengan baik, yaitu diktum *Sedumuk bathuk senyari bumi, pecahing dhadha wutahing ludira, sun labuhi taker pati*, yang artinya: jika dahi kita dicoreng (dipermalukan), sejengkal tanah kita dirambah, pecahnya dada dan tumpahnya darah, tekun kami jalani, nyawa taruhannya.

Ki Hadjar sendiri, seiring dengan Sumpah Pemuda 1928, telah menegaskan pada tahun yang sama: “...*Pengajaran harus bersifat kebangsaan Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita. ...*”.

Sebagai penutup saya sampaikan untuk melanjutkan dan mengisi Kebangkitan Nasional kita. Saya sampaikan diktum sebagai berikut: *kewaspadaan adalah harga Kemerdekaan*, yang setiap nasionalis harus membayarnya.

Sekianlah, sekali lagi Selamat Merayakan Hari Kebangkitan Nasional, Selamat Melanjutkan dan Mengisi Kebangkitan Nasional Indonesia, Menuju Kebesaran dan Kejayaan Bangsa.

Salam!

Jakarta, 20 Mei 2021
Ki Sri-Edi Swasono